BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Meningkatkan Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang, dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

4.1.1. Analisis Lingkungan Internal Disdukcapil Kota Semarang dalam Strategi Peningkatan Capaian IKD

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal, dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Semarang telah memiliki modal strategis yang cukup kuat dalam mendukung transformasi layanan digital melalui IKD. Beberapa kekuatan internal yang menonjol meliputi ketersediaan infrastruktur pelayanan seperti TPDK Kecamatan, kompetensi SDM teknis yang mumpuni, serta adanya inovasi pelayanan seperti Si'Dnok dan "Anti Mager". Hal ini menunjukkan adanya kapasitas organisasi yang progresif dan responsif dalam menjawab kebutuhan digitalisasi administrasi kependudukan.

Kelemahan internal masih cukup signifikan dan perlu segera ditindaklanjuti. Kelemahan tersebut meliputi belum adanya SOP baku untuk aktivasi IKD, keterbatasan jumlah personel dalam pelayanan digital, dan belum maksimalnya integrasi sistem antar layanan. Selain

itu, keberlanjutan program inovatif seperti “Anti Mager” masih sangat bergantung pada keterlibatan eksternal seperti mahasiswa magang, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam jangka panjang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi internal tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan teknis, tetapi harus diperkuat dengan struktur kelembagaan yang sistematis dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur harus diimbangi dengan prosedur kerja yang jelas dan standar layanan yang terukur. Kelemahan seperti ketiadaan SOP dan kurangnya pelatihan intensif bagi SDM perlu diatasi agar seluruh potensi internal dapat dimobilisasi secara optimal.

4.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal Disdukcapil Kota Semarang dalam Strategi Peningkatan Capaian IKD

Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat multidimensional seperti keterlibatan stakeholder, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meskipun strategi kolaboratif seperti pelibatan RT/RW, mahasiswa magang, dan forum warga telah diterapkan, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.

Secara nyata, resistensi masyarakat terhadap penggunaan IKD berasal dari rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman manfaat IKD, dan ketergantungan pada layanan manual. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara sadar dan berkelanjutan. Di sisi lain, peran stakeholder wilayah seperti kelurahan dan kecamatan lebih bersifat fasilitatif dan belum memiliki fungsi advokasi yang kuat dalam mendorong adopsi IKD. Selain itu, belum adanya regulasi dari pemerintah pusat yang bersifat mengikat menyebabkan kebijakan IKD bersifat imbauan, bukan kewajiban.

Situasi ini menandakan bahwa strategi eksternal belum cukup menyentuh aspek perubahan perilaku dan kepercayaan publik. Sosialisasi yang bersifat insidental dan belum terstandardisasi menimbulkan potensi ketimpangan informasi di tingkat warga. Risiko disinformasi dan pelaksanaan formalitas juga dapat melemahkan legitimasi program. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi eksternal yang lebih sistemik dan berbasis komunitas, bukan hanya berfokus pada capaian kuantitatif, tetapi juga transformasi sosial.

Disdukcapil Kota Semarang perlu memperkuat komunikasi publik melalui strategi edukasi digital berbasis lokal, menjalin kemitraan jangka panjang dengan lembaga pendidikan dan media komunitas, serta mendorong diterbitkannya kebijakan nasional yang bersifat mengikat dan memberikan insentif bagi masyarakat pengguna IKD. Pendekatan kolaboratif dan kontekstual, bila dijalankan secara

konsisten dan berbasis evaluasi, diyakini mampu meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan keterlibatan publik dalam mendukung transformasi layanan kependudukan digital secara menyeluruh.

4.1.3. Perumusan Isu Strategis dalam Meningkatkan Capaian IKD di Disdukcapil Kota Semarang

Berdasarkan analisis matriks SWOT dan melakukan penujian dengan uji litmus, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Semarang berada pada posisi yang menuntut respons adaptif, sinergis, dan inovatif. Identifikasi faktor internal menunjukkan bahwa Disdukcapil memiliki sejumlah kekuatan seperti ketersediaan infrastruktur pelayanan, inovasi program jemput bola "Anti Mager", serta kemitraan aktif dengan stakeholder pendidikan. Namun demikian, kelemahan seperti ketiadaan SOP aktivasi IKD, keterbatasan SDM, dan integrasi sistem yang belum optimal menjadi tantangan signifikan yang harus segera dibenahi.

Dari sisi faktor eksternal, peluang besar terbuka melalui dukungan kebijakan nasional digitalisasi adminduk serta potensi partisipasi masyarakat berbasis komunitas. Akan tetapi, tantangan eksternal seperti resistensi masyarakat, belum optimalnya literasi digital, dan belum adanya regulasi nasional yang mengikat terhadap penggunaan IKD menjadi faktor penghambat yang harus dikelola dengan bijak. Melalui uji litmus yang menguji kelayakan tiap strategi

terhadap dimensi kesesuaian visi, daya dukung, dan potensi dampak, diperoleh strategi unggulan yang dapat segera diaplikasikan. Beberapa strategi yang dinilai layak dan strategis sebagai peyempurnaan upaya yang sudah ada yaitu:

1. Melakukan audiensi dan advokasi kepada pemerintah pusat dan instansi terkait untuk mendorong regulasi dan kerja sama dalam integrasi IKD lintas sektor.
2. Membangun kolaborasi formal dengan instansi terkait melalui MoU.
3. Menyediakan *booth* IKD Corner bergerak dilengkapi fasilitas di lokasi-lokasi strategis sesuai target sasaran seperti sekolahan, rumah sakit, atau CFD.
4. Mendesain "Gerakan Aktivasi IKD Massal" secara berkala di setiap kelurahan menggandeng stakeholder yang ada.
5. Penyelenggaraan "Pionir IKD" dengan memanfaatkan figur-figur muda yang populer dan memiliki jangkauan luas di kalangan masyarakat untuk menyebarkan informasi, mendorong aktivasi IKD, dan engumpulkan masukan dari warga.
6. Memperluas lokasi jemput bola terutama kawasan yang jauh dari jangkauan Disdukcapil.

4.2. Saran

Berdasarkan perumusan isu strategis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa rekomendasi atlernatif strategi yang mampu

meningkatkan capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Semarang dari analisis dan penilaian uji litmus sebagai berikut:

1. Melakukan audiensi dan advokasi kepada pemerintah pusat dan instansi lintas sektor

   Disdukcapil Kota Semarang disarankan untuk secara aktif melakukan audiensi dan advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat, khususnya Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta kementerian/lembaga terkait seperti Kemenkes, Kemendikbudristek, OJK, dan Kemenkominfo. Langkah ini dinilai sebagai respons strategis terhadap isu krusial yang teridentifikasi dalam analisis SWOT dan uji litmus, yakni tidak adanya regulasi nasional yang bersifat mengikat mengenai pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara lintas sektor.
2. Membangun forum koordinasi kolaboratif lintas OPD dan stakeholder lokal

   Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi langkah fundamental dalam menyempurnakan strategi pelayanan digital yang dijalankan oleh Disdukcapil Kota Semarang. Selama ini, pelaksanaan aktivasi IKD masih bergantung pada inisiatif kegiatan insidental seperti program “Anti Mager”, pelayanan akhir pekan, dan sosialisasi melalui forum RT/RW. Meskipun strategi ini nantinya mampu menunjukkan hasil yang positif, namun masih belum mampu membangun sistem pelayanan yang bersifat *institutionalized*, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di seluruh wilayah kota. Permasalahan ini erat kaitannya

dengan tidak ada peraturan baku atau SOP tertulis yang dapat menjadi rujukan seluruh jajaran pelaksana. Akibatnya, pelaksanaan aktivasi IKD sering kali bergantung pada kapasitas personal, improvisasi di lapangan, serta peluang kegiatan sosial yang terbatas. Hal ini berdampak pada ketidaksamaan mutu layanan**,** duplikasi pesan saat sosialisasi, serta lemahnya dokumentasi dan pelaporan sebagai basis evaluasi kebijakan.

3. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi internal dan eksternal

   Upaya peningkatan capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak dapat hanya diukur dari seberapa banyak masyarakat yang telah melakukan aktivasi, melainkan juga dari tingkat pemanfaatan dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi IKD dalam kehidupan sehari-hari**.** Dalam konteks ini, Disdukcapil Kota Semarang perlu menggeser paradigma evaluasi program dari sekadar output (jumlah aktivasi) menuju evaluasi berbasis hasil (*outcome-oriented*) yang mempertimbangkan kebermanfaatan, keberlanjutan, dan dampak sosial dari program IKD. Masyarakat yang tidak memahami nilai strategis IKD akan cenderung menganggap program ini sebagai formalitas administratif semata.